Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 3982-3988

Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Harga Gabah oleh Pemerintah Pusat (Studi Kasus di Kabupaten Kolaka)

Edi Usman[1], Ikbal[2], Jumasrah[3], Widya Yusti Handayani[4], Sudirman Asis[5], M Ade Ilham Saputra[6]
[1,2,3,4,5,6] **Universitas Sains Islam Almawaddah Warrahmah Kolaka, Kolaka, Indonesia**
Corresponding Author: Edi usman, e-mail: edi.usman092@gmail.com

Published: May, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika pelaksanaan kebijakan harga gabah oleh pemerintah pusat di Kabupaten Kolaka. Kebijakan harga gabah merupakan upaya strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani sebagai produsen utama beras, yang merupakan bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan kebijakan harga gabah, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut di tingkat daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat pemerintah daerah, petani, dan pelaku pasar gabah, serta observasi lapangan dan dokumentasi terkait kebijakan harga gabah. Analisis data dilakukan secara tematik dengan pengkodean sistematis untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan harga gabah di Kabupaten Kolaka dipengaruhi oleh ketidaksesuaian harga pembelian pemerintah dengan harga pasar lokal, kendala koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterbatasan infrastruktur distribusi. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan iklim dan keterbatasan akses petani terhadap informasi dan teknologi turut mempengaruhi dinamika pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dan partisipatif, penguatan koordinasi, penyederhanaan prosedur, serta pemberdayaan petani untuk meningkatkan efektivitas kebijakan harga gabah dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Harga Gabah, Pelaksanaan Kebijakan, Ketahanan Pangan, Petani, Koordinasi Pemerintah, Studi Kasus, Kabupaten Kolaka.

ABSTRACT

This study discusses the dynamics of the implementation of the central government's rice price policy in Kolaka Regency. The rice price policy is a strategic effort by the government to maintain price stability and the welfare of farmers as the main producers of rice, which is the staple food of the Indonesian people. The purpose of this study is to understand in depth the process of implementing the rice price policy, the challenges faced, and the factors that influence the effectiveness of the policy at the regional level. The type of research used is qualitative with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with key informants such as local government officials, farmers, and rice market players, as well as field observations and documentation related to the rice price policy. Data analysis was carried out thematically with systematic coding to identify the main patterns and themes that emerged from the data. The results of the study indicate that the implementation of the rice price policy in Kolaka Regency was influenced by the mismatch between government purchase prices and local market prices, coordination constraints between the central and regional governments, and limited distribution infrastructure. In addition, external factors such as climate change and limited farmer access to information and technology also influenced the dynamics of policy implementation. This study emphasizes the importance of a holistic and participatory approach, strengthening coordination, simplifying procedures, and empowering farmers to increase the effectiveness of the rice price policy and support sustainable food security.

Keywords: Rice Price Policy, Policy Implementation, Food Security, Farmers, Government Coordination, Case Study, Kolaka Regency.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kebijakan harga gabah di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi pertanian nasional. (Suryana et al., 2014). Harga Gabah ditetapkan dengan tujuan melindungi petani dari kerugian akibat fluktuasi harga di pasar dan memastikan keberlanjutan produksi beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Namun, pelaksanaan kebijakan ini seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam hal distribusi dan penyerapan gabah hasil panen.(Putri Amirah Latifah, 2024). Salah satu kendala signifikan adalah fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti gangguan produksi akibat El Nino, perubahan geopolitik global, hingga kebijakan restriksi ekspor pangan oleh negara lain, sehingga turut mempengaruhi harga gabah di dalam negeri. (Ummah, 2023)

Dalam kerangka pembangunan nasional, pemerintah telah menempatkan stabilitas harga pangan sebagai prioritas utama, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengendalian inflasi, serta upaya pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi dasar pijakan bagi kebijakan harga gabah. Dengan demikian, kebijakan harga gabah tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan kualitas pertumbuhan ekonomi secara nasional.(Bappenas, 2015)

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah untuk melindungi petani dan mendukung swasembada pangan. Pada 31 Maret 2023, Bapanas mengumumkan kenaikan HPP gabah kering panen (GKP) dari Rp4.200 menjadi Rp5.000 per kilogram, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani dan stabilitas pangan nasional. (Suryana et al., 2023) Lebih lanjut, pada 30 Januari 2025, pemerintah kembali menyesuaikan HPP GKP menjadi Rp6.500 per kilogram, dengan menghilangkan mekanisme rafaksi harga yang sebelumnya diberlakukan. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah penyerapan gabah oleh Perum Bulog dan memastikan harga yang lebih menguntungkan bagi petani. (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025)

Petani di Kabupaten Kolaka merasakan dampak positif dari kebijakan HPP gabah. Dengan harga yang lebih tinggi, petani memiliki insentif untuk meningkatkan produksi dan kualitas gabah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung kesejahteraan petani.(Kolaka, 2025). Di tingkat pelaksana, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung stabilisasi harga gabah, seperti fasilitasi distribusi pangan dan penyelenggaraan bazar pangan murah. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) misalnya, secara konkret bertujuan menjaga harga pembelian gabah di tingkat petani agar tetap menguntungkan, sekaligus memastikan harga penjualan di tingkat konsumen tetap terjangkau. Namun, gejolak harga tetap terjadi terutama saat panen raya, ketika harga gabah cenderung turun di bawah Harga Pembelian Pemerintah

(HPP), atau sebaliknya saat pasokan menurun yang menyebabkan harga melonjak di pasar konsumen.(Adhawiyah, 2024).

Penelitian-penelitian terkini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan harga gabah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks Kabupaten Kolaka, dinamika pelaksanaan kebijakan harga gabah memperlihatkan adanya tantangan mulai dari penyesuaian harga di tingkat petani, keterbatasan fasilitas distribusi, hingga perlunya peningkatan efisiensi penyerapan hasil panen. Kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung ketahanan pangan daerah. Selain itu, kebijakan harga gabah juga harus selaras dengan upaya peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kesejahteraan petani sebagai produsen utama di sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh stabilitas harga, tetapi juga peluang investasi, perbaikan infrastruktur pertanian, serta pengembangan teknologi.(Wahyudi, 2012) Dengan demikian, studi kasus di Kabupaten Kolaka dapat memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan harga gabah, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dinamika pelaksanaan kebijakan harga gabah oleh pemerintah pusat di Kabupaten Kolaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi proses, persepsi, dan interaksi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut secara kontekstual dan holistik. Penelitian ini menekankan pada pengumpulan data yang kaya dan detail melalui berbagai teknik, sehingga dapat menggambarkan realitas sosial yang kompleks terkait kebijakan harga gabah. (Tisdel, 2016)

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pejabat pemerintah daerah, petani, dan pelaku pasar gabah. Wawancara ini dirancang secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel namun tetap fokus pada topik penelitian. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk mengamati langsung proses pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah, termasuk mekanisme distribusi dan interaksi antara petani dengan pemerintah. Dokumentasi berupa laporan resmi, peraturan, dan data statistik juga dikumpulkan untuk melengkapi dan memperkuat analisis(Hardani, 2020).

Analisis data dilakukan secara tematik dengan langkah-langkah pengkodean data yang sistematis. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikaji untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang relevan dengan dinamika pelaksanaan kebijakan harga gabah. Proses analisis ini bersifat iteratif, di mana peneliti terus-menerus membandingkan data baru dengan temuan sebelumnya untuk

memastikan validitas dan kedalaman pemahaman. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan konteks, tantangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan (Lungu, 2022).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang (*member checking*) dengan beberapa informan untuk memastikan interpretasi data sudah sesuai dengan perspektif mereka. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian (Muhammad Hasan, 2023).

Dengan menggunakan metode kualitatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana kebijakan harga gabah dijalankan di Kabupaten Kolaka, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaannya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan petani dan masyarakat (Swift, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan harga gabah oleh pemerintah pusat di Kabupaten Kolaka mengalami dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu temuan utama adalah adanya ketidaksesuaian antara harga pembelian pemerintah (HPP) dengan harga pasar lokal yang sering kali menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Sari dan Nugroho yang menyatakan bahwa fluktuasi harga gabah di tingkat daerah seringkali tidak sejalan dengan kebijakan pusat, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi petani (Nugroho et al., 2025). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur distribusi yang menghambat penyerapan gabah oleh Bulog dan lembaga terkait.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan petani dan pejabat daerah mengungkapkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah di Kabupaten Kolaka menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kebijakan harga gabah dengan kondisi lokal yang spesifik, seperti musim panen dan tingkat produksi. Studi oleh Suhardi mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial dalam pelaksanaan kebijakan pertanian agar dapat responsif terhadap dinamika lokal.(Suhardi, 2024) Kurangnya komunikasi efektif menyebabkan kebijakan harga gabah kurang optimal dalam menjawab kebutuhan petani.

Dari sisi mekanisme pelaksanaan, observasi lapangan mengindikasikan bahwa proses penyerapan gabah oleh Bulog di Kabupaten Kolaka masih menghadapi kendala administratif dan teknis. Prosedur yang rumit dan waktu penyerapan yang lama menyebabkan petani cenderung menjual gabah ke pasar bebas dengan harga yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan temuan dari Surya yang menyoroti bahwa

birokrasi yang berbelit dalam penyerapan gabah dapat menurunkan efektivitas kebijakan harga pemerintah. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur dan percepatan proses penyerapan menjadi rekomendasi penting (Sembiring et al., 2021).

Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan iklim dan kondisi pasar global juga mempengaruhi dinamika harga gabah di Kabupaten Kolaka. Perubahan cuaca yang tidak menentu berdampak pada hasil panen dan kualitas gabah, sehingga mempengaruhi harga di pasar lokal. Penelitian oleh Teddy mengungkapkan bahwa ketidakpastian iklim menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi stabilitas harga pangan di daerah-daerah agraris. Oleh karena itu, kebijakan harga gabah perlu diintegrasikan dengan strategi adaptasi perubahan iklim untuk menjaga ketahanan pangan.(Arifiyanto, 2024)

Dalam konteks sosial ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di Kabupaten Kolaka masih menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi harga dan teknologi pertanian. Hal ini menyebabkan mereka kurang mampu memanfaatkan kebijakan harga gabah secara optimal. Studi oleh Asbi et.al menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan penyuluhan agar mereka dapat beradaptasi dengan kebijakan dan kondisi pasar yang dinamis. Peningkatan literasi pertanian menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan harga gabah. (Amin et al., 2023)

Pembahasan lebih lanjut menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih partisipatif dalam pelaksanaan kebijakan harga gabah. Keterlibatan aktif petani dan pemangku kepentingan lokal dalam perumusan dan evaluasi kebijakan dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Sali Susiana yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan pertanian dapat memperkuat implementasi dan keberlanjutan program. Dengan demikian, kebijakan harga gabah tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan lokal.(Susiana, 2015)

Akhirnya, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan harga gabah di Kabupaten Kolaka memerlukan pendekatan yang holistik dan adaptif. Integrasi antara kebijakan harga, peningkatan infrastruktur, penguatan koordinasi antar pemerintah, serta pemberdayaan petani menjadi faktor kunci keberhasilan. Penelitian oleh Iim et.al mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa kebijakan pertanian yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lokal dan global secara simultan. (Mucharam et al., 2022) Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan harus mempertimbangkan aspek teknis, sosial, dan lingkungan secara terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan harga gabah oleh pemerintah pusat di Kabupaten Kolaka menghadapi berbagai dinamika yang kompleks, mulai dari ketidaksesuaian harga pembelian pemerintah dengan harga pasar lokal hingga kendala koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur distribusi, prosedur birokrasi yang rumit, perubahan iklim, serta keterbatasan akses petani terhadap informasi dan teknologi turut mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan harga gabah memerlukan pendekatan yang holistik dan adaptif, dengan penguatan koordinasi antar pemerintah, penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas petani, serta integrasi strategi adaptasi perubahan iklim. Pendekatan partisipatif yang melibatkan petani dan pemangku kepentingan lokal juga sangat penting untuk meningkatkan relevansi dan keberlanjutan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan harga gabah yang responsif terhadap kondisi lokal dan global dapat mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adhawiyah, R. (2024). STRATEGI PERUM BULOG DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA PANGAN PADA KANTOR PERUM BULOG CABANG KOTA PAREPARE (TINJAUAN EKONOMI ISLAM). *Ayan*, *15*(1), 37–48.

Amin, A., Hala, Y., & Diana, F. (2023). PENINGKATAN KAPASITAS PETANI MELALUI PELATIHAN PEMBUKUAN SEDERHANA DI DESA KABBA KABUPATEN PANGKEP. *JOURNAL OF TRAINING AND COMMUNITY SERVICE ADPERTISI (JTCSA*, *3*(1).

Arifiyanto, T. (2024). *IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN TNI MELALUI KONSEP GREEN ECONOMY GUNA Oleh :*

Bappenas. (2015). Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. *Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2015–2019.

Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025). Pemerintah Tetapkan Harga Pembelian Gabah Rp6.500 per Kg Targetkan Swasembada Pangan 2025. *Menpan.Go.Id*. https://doi.org/https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-tetapkan-harga-pembelian-gabah-rp6-500-per-kg-targetkan-swasembada-pangan-2025.

Kolaka, D. (2025). *Detail Pemkab Kolaka Melakukan Sidak Pasar Menjelang Ramadhan*. kolakakab.go.id,. https://doi.org/https://kolakakab.go.id/detail/pemkab-kolaka-melakukan-sidak-pasar-menjelang-ramadhan.

Lungu, M. (2022). Book Review. *American Journal of Qualitative Research 2*, *6*(1), 1–12.

Mucharam, I., Rustiadi, E., Fauzi, A., & Harianto. (2022). Signifikansi Pengembangan Indikator Pertanian Berkelanjutan Untuk Mengevaluasi Kinerja Pembangunan Pertanian Indonesia. *RISALAH*

KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN, *9*(2), 61–81. https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v9i2.28038

Muhammad Hasan, T. K. H. (2023). *Metode penelitian kualitaf*.

Nugroho, F. W., Handrian, M. F., Khaikal, M., & Malik, A. (2025). Pengaruh harga terhadap jumlah penawaran produk pertanian di indonesia. *Manajemen Bisnis Syariah*, *2*, 59–67.

Putri Amirah Latifah. (2024). Putri Amirah Latifah, Maria Michelle, Raina Siska Pratiwi, Fadlan Ravi Setiawan. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, *2*(3), 17–25.

Sembiring, S. A., Sihaloho, H., & Sirait, T. N. (2021). Efektivitas Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Harga Gabah Kering Giling Berdasarkan Instruksi Presiden Tentang Kebijakan Perberasan. *Jurnal Agriust*, *2*(1), 39–45. http://ejournal.ust.ac.id/index.php/AGRIUST/article/view/1792%0Ahttp://ejournal.ust.ac.id/index.php/AGRIUST/article/view/1792/1681

Suhardi, P. P. (2024). Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi JIMBE*, *1*(5), 285–292.

Suryana, A., Mardianto, S., & Ihksan, M. (2023). Dinamika Kebijakan Perberasan Nasional. In *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*.

Suryana, A., Rachman, B., & Hartono, D. (2014). Dinamika Kebijakan Harga Gabah Dan Beras Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, *7*, 155–168.

Susiana, S. (2015). Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. In *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi*.

Swift, A. (2022). Being Creative with Resources in Qualitative Research. *The SAGE Handbook of Qualitative Research Design*, *April*, 290–306. https://doi.org/10.4135/9781529770278.n19

Tisdel, S. B. M. E. J. (2016). QUALITATIVE RESEARCH A Guide to Design and Implementation. In *Jossey-Bass* (Vol. 11, Issue 1).

Ummah, M. S. (2023). Laporan Monitoring Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023. *Badan Pangan Nasional*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Wahyudi, K. D. (2012). Strategic Policies for Agricultural Businesses in the Framework of Increasing Production and Reducing Poverty. *Majalah Ilmiah "DIAN ILMU" (Local Journal)*, *11*(2), 78–91.